

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensif Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Pekanbaru  
Riau*



**OLEH :**

**NUNUNG NURHAYATI**  
**10873003108**

**KONSENTRASI KEUANGAN**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI S-1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU  
2012**



## ABSTRAK

### PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR

**OLEH : NUNUNG NURHAYATI**  
**10873003108**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten rokan hilir. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 17. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Populasi responden pada penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian, dan DPRD bagian anggaran pada instansi pemerintah daerah yang ada di kabupaten rokan hilir, dengan jumlah sampel sebanyak 65 responden.*

*Hasil penelitian menunjukkan pertama, instrument yang digunakan dalam penelitian ini handal dan valid melalui pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Pearson Corelation dan Croanbach Alpha. Kedua secara parsial hipotesis pertama diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif (-1,292) yang tidak signifikan (0,202) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan nilai  $t$  hitung  $-1,292 < t$  tabel 1,673. Hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif (2,954) yang signifikan (0,005) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,954 > t$  tabel 1,673. Hipotesis ketiga diperoleh kesimpulan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif (1,554) yang tidak signifikan (0,126) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dimana nilai  $t$  hitung sebesar  $1,554 < t$  tabel sebesar 1,673. Hipotesis keempat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif (3,170) yang signifikan (0,003) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dimana nilai  $t$  hitung sebesar  $3,170 > t$  tabel sebesar 1,673. Dan hasil secara simultan diketahui bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran mempunyai pengaruh positif (6,924) yang signifikan (0,000) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dimana nilai  $F$  hitung sebesar  $6,924 > F$  tabel sebesar 2,553.*

*Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, dan Evaluasi Anggaran.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
TABEL GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Defenisi Anggaran .....	13
B. Pengertian APBD.....	16
C. Penganggaran Daerah .....	21
D. Karakteristik Tujuan Anggaran .....	22
E. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	27
F. Pandangan Islam Tentang Kinerja.....	33
G. Pengembangan Hipotesis .....	35
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	35

2. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	36
3. Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	37
4. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	38
5. Pengaruh Partisipasi anggaran, Kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparap pemerintah daerah .....	39
H. Review Penelitian Terdahulu.....	40
I. Model Penelitian .....	46

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel.....	47
B. Teknik Pengumpulan Data.....	48
C. Defenisi Variabel Operasional dan Pengukuran .....	49
1. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	50
2. Partisipasi Anggaran .....	50
3. Kejelasan Tujuan Anggaran.....	51
4. Umpan Balik Anggaran .....	51
5. Evaluasi Anggaran .....	52
D. Analisis Data.....	52
E. Pengujian Hipotesis .....	56

### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden .....	59
B. Statistik Deskriptif Responden .....	62
C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	64
D. Analisis Data Penelitian .....	70
E. Analisa Hasil Penelitian .....	77
F. Pembahasan .....	83

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	88
B. Keterbatasan penelitian .....	90
C. Saran .....	91

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Penelitian .....	41
Gambar IV.1 Diagram Scatterplot Heterokedastisitas .....	74

## DAFTAR TABEL



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Peneliti Terdahulu .....	41
Tabel III.1 Nama Dinas-Dinas Di Kabupaten Rokan Hilir .....	48
Tabel IV.1 Populasi Penelitian.....	59
Tabel IV.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	60
Tabel IV.3 Demografi Responden .....	61
Tabel IV.4 Statistik Deskriptif Responden .....	63
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pemda .....	64
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran .....	66
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kejelasan tujuan Anggaran.....	67
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Umpan Balik Anggaran .....	68
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Evaluasi Anggaran .....	69
Tabel IV.10 Hasil Uji Normalitas (K-S-Z Test ) .....	72
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinearitas .....	73
Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi .....	74
Tabel IV.13 hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser) .....	76
Tabel IV.14 Hasil Regresi.....	77
Tabel IV.15 Hasil Uji t Hitung.....	79
Tabel IV.16 Hasil Uji F Hitung .....	81
Tabel IV.17 Hasil Koefisien Determinasi.....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999. Pada masa ini pemerintah daerah dijadikan sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Termasuk dalam kebijakan penyusunan anggaran daerah yang tidak lagi dibuat di pemerintah pusat, melainkan dibuat di pemerintah daerah sendiri. Namun setiap kebijakan pemerintah daerah masih tetap berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masing-masing daerah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut demi kemajuan daerahnya, pemerintah pusat tidak bisa secara langsung campur tangan dalam setiap aktivitas yang dilakukan daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai mediator dan penengah, serta pemberi petunjuk atas hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemda, termasuk juga dalam hal penyusunan anggaran.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki potensi anggaran yang potensial, dimana provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang banyak baik migas maupun non migas seperti perkebunan dan sektor industri.

Perkembangan ekonomi dan kegiatan pembangunan yang sangat pesat juga menuntut dijalinnya kerjasama dengan pihak lain diberbagai bidang dalam upaya untuk meningkatkan investasi dan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penanganan keuangan daerah yang transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan undang-undang dan Prinsip Akuntansai Keuangan Daerah.

Anggaran adalah sebuah perencanaan yang diformulasikan dalam bentuk angka-angka berupa kebijaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan serta berlaku untuk masa yang akan datang. Beberapa penelitian menyatakan bahwa anggaran adalah gambaran kuantitatif dari tujuan-tujuan manajemen dan sebagai alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Hansen dan Mowen (2000:87) menjelaskan bahwa anggaran merupakan suatu metode penerjemahan tujuan dan sasaran organisasi menjadi hal yang operasional. Anggaran tidak hanya merupakan perencanaan keuangan dari pusat-pusat

pertanggungjawaban dalam perusahaan tetapi juga merupakan alat pengendalian, koordinasi, dan komunikasi (Kennis, 1979).

Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mencari jalan yang paling menguntungkan sehingga perusahaan dapat diarahkan untuk memenuhi tujuannya. Anggaran yang telah disusun oleh perusahaan akan selalu terpengaruh oleh kondisi diluar perusahaan yang selalu berubah seperti keadaan politik, sosial, dan budaya suatu negara. Kondisi-kondisi tersebut tidak semuanya dapat dikendalikan oleh perusahaan.

Fungsi anggaran, sebagai alat pengendalian dalam arti luas, mencakup kegiatan pengaturan orang-orang dalam organisasi (Hanson, 1999). Proses penyusunan anggaran, merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, karena kemungkinan dampak fungsional atau disfungsional sikap dan perilaku anggota organisasi yang ditimbulkan.

Pengaruh anggaran atas perilaku, sikap dan kinerja pada manajer level bawah sebagian mengikuti gaya penganggaran manajemen puncak (Kenis, 1979). Lima karakteristik tujuan penganggaran yang dinyatakan oleh Kenis (1979) meliputi : **partisipasi penyusunan anggaran (*budgetary participation*)**, **kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*)**, **kesulitan sasaran anggaran (*budgetary goal difficulty*)**, **evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*)**, dan **umpan balik anggaran (*budgetary feedback*)**. Tentu saja, manajemen puncak dengan bantuan bawahan dan bagian akuntansi, akan menentukan jumlah dan bentuk partisipasi manajer level menengah dan bawah dalam menyusun sasaran anggaran, frekuensi dan jumlah umpan balik, tingkat kejelasan dan kesulitan

sasaran anggaran. Pemilihan beberapa pendekatan penyusunan anggaran dapat mempunyai pengaruh yang kuat dan menentukan dalam merencanakan dan mengendalikan dinamika yang berkaitan dengan anggaran sehingga secara praktis menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Kenis dalam Maryanti (2002) menjelaskan hubungan dengan karakteristik tujuan anggaran, dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan mudah dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab.

Kemudian, umpan balik mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer. Penemuan ini gagal untuk menjelaskan hasil dari berbagai studi dengan hubungan umpan balik sikap dan kinerja dalam *task-goal setting*. Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan penting

dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP No. 58 Tahun 2005).

Pendekatan kinerja APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjarangan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjarangan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

Meskipun demikian, proses perencanaan APBD dengan paradigma barunya menekankan pada pendekatan *Bottom –up Planning*, yaitu keikutsertaan bawahan pada level tertentu untuk ikut dalam pengajuan anggaran (anggaran

partisipatif). Mengacu pada kebijakan pembangunan pemerintah pusat (Mardiasmo, 2001). Hal ini sesuai dengan pendapat Agirys (1952) dalam Darlis (2005) yang menyarankan perlunya bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran karena menurutnya partisipasi dalam penyusunan anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Penelitian pengaruh partisipasi anggaran dengan kinerja yang dilakukan disektor publik khususnya pada lingkungan pemerintah daerah juga telah dilakukan. Diantaranya oleh Munawar, dkk (2006), Maryanti (2002) dan Darlis (2005). Hasil penelitian Munawar dkk. (2006) menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran yang diwakili oleh variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja. Hal ini terbukti bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena semakin baik aparat pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan anggaran dan sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah ditetapkan maka semakin baik kinerjanya.

Penelitian Maryati (2002) merupakan pengembangan dari penelitian Kenis (1979) yaitu tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah diprovinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Perbedaan dari penelitian Maryanti (2002) dengan penelitian Kenis (1979) adalah pada variabel dependen yaitu Maryanti (2002) menambah variabel perilaku sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen sama seperti penelitian



kenis (1979) yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan kinerja, kesulitan anggaran, dengan populasi dan sampelnya berbeda pula yaitu kenis (1979) populasinya adalah manajer tingkat menengah pada sektor privat, sedangkan Maryanti (2002) populasinya aparat pemerintah daerah pada sektor Publik. Hasil penelitian Maryanti (2002) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan sikap aparat pemerintah daerah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan sikap aparat Pemda NTT dalam menyusun dan melaksanakan anggaran adalah cukup positif, dengan demikian anggaran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mudah dievaluasi sehingga membuat mereka merasa sukses terhadap tujuan anggaran yang dibuat karena jelas dan spesifik. Variabel lain seperti partisipasi anggaran dan kesulitan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku dan sikap aparatur pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Disisi lain partisipasi anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan anggaran yang dibuat tidak spesifik dan tidak jelas sehingga membuat kinerja aparat pemerintah daerah menjadi rendah.

Menurut Agirys (1952) dalam Darlis (2005) menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan. Partisipasi umumnya dinilai sebagai sesuatu pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi.

Menurut Munawar (SNA 9 Padang, 2006), hasil penelitian ini secara simultan mendukung penelitian Maryanti (2002) yaitu karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara positif terhadap perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap perilaku aparat pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam menyiapkan rencana penyusunan anggaran. Dengan demikian aparat pemerintah daerah kabupaten kupang dalam menyiapkan rencana penyusunan anggaran satuan kerja (RASK) dimasing-masing unit kerja yang nantinya akan dijadikan sebagai rencana APBD kabupaten telah mengikuti sistem anggaran kinerja.

Ikhsan dan Ane (2007) melakukan penelitian dengan judul pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan menggunakan Lima Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian berdasarkan output yang dihasilkan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.

Rahayu, dkk (2007) melakukan penelitian dengan judul Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi. Pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak dinikmati oleh kalangan birokrasi, menunjukkan bahwa fokus dan alokasi dana pembangunan masih hrus

terus diperbaiki. Partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan bukan hanya pada pengajuan usulan program/kegiatan saja. Pemerintah daerah harus membuka akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang anggaran daerah yang disusun. Sosialisasi tentang hak dalam proses penganggaran pemerintah daerah harus diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Penulis melakukan penelitian ini di Kabupaten Rokan Hilir pada instansi pemerintah, dimana peneliti sebelumnya menggunakan 3 variabel dependen yaitu perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel dependen yaitu kinerja.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menguji kembali “PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR”

### **B.Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
2. Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

3. Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
4. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
5. Apakah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan, umpan balik, evaluasi anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

### **C.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
- b. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
- c. Untuk mengetahui pengaruh umpan balik anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
- d. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
- e. Untuk mengetahui partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian :

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah
- b. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
- c. Menjadi referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti yang ingin meneliti hal yang sama di masa yang akan datang

### **D.Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematik sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian secara sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti pengertian anggaran, pengertian APBD, penyusunan APBD, karakteristik tujuan anggaran meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi

anggaran dan tinjauan penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan data yang digunakan dalam bentuk metodologi penelitian yang meliputi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data, definisi variabel operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian serta pembahasan dari data yang telah diolah yang terdiri dari hasil pengumpulan data, demografi responden, pengukuran variabel, metode pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, berikut batasan-batasan yang ditentukan serta saran-saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang untuk judul peneliti yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Anggaran**

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan Dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh menteri dalam Negeri.

Hansen dan Mowen (2001:350) mendefinisikan anggaran atau *budget* sebagai perencanaan keuangan untuk masa depan yang memuat tujuan serta tindakan-tindakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. Suatu anggaran biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun ini.

Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut : “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur yang lain, mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun

berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan”.

Berdasarkan definisi anggaran diatas, dapat diartikan anggaran sebagai suatu perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yang akan direalisasikan dalam jangka waktu kedepan, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun.

Anggaran memiliki beberapa fungsi utama ( Mardiasmo,2002) yaitu :

- a. Sebagai Alat Perencanaan.  
Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternative sumber pembiayaan.
- b. Alat Pengendalian  
Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
- c. Alat Kebijakan Fiskal  
Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Alat Politik  
Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legeslatif atas penggunaan dana publik.
- e. Alat Koordinasi Dan Komunikasi  
Penyusun anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.
- f. Alat Penilaian Kinerja  
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.



g. Alat Motivasi

Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai atau menuntut tetapi dapat diwujudkan sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, anggaran harus diorganisir sehingga dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Proses penyusunan anggaran seharusnya diwakili dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesuksesan anggaran dapat dicapai dengan kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan.

Halim (2002: 13) mengatakan fungsi anggaran negara sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola Negara untuk suatu periode dimasa mendatang
2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang dipilih pemerintah karena sebelum anggaran Negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

Menurut Bastian (2007 : 164) Fungsi anggaran sektor publik adalah :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrument politik
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal

## **B. Pengertian APBD**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah menyatakan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana, perubahan dan perhitungan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Jenis informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam nomor 11 tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota
- b. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- c. Neraca daerah
- d. Dana cadangan daerah
- e. Pinjaman dan hibah daerah
- f. Piutang daerah
- g. Laporan keuangan badan usaha milik daerah
- h. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawabkan vertikal kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk

aspek peñatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No.104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan) dan desentralisasi. Dana dekonsentrasi terbentuk dan bagi hasil, dan umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud desentralisasi adalah dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

### **C. Penyusunan APBD**

Proses penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002) mempunyai fungsi utama, yaitu : (a) sebagai alat perencanaan, (b) alat pengendalian, (c) alat kebijakan fiskal, (d) alat politik, (e) alat koordinasi dan komunikasi, (f) alat penilaian kinerja, (g) alat motivasi, dan (h) alat menciptakan ruang publik.

Menurut Sumarno (2005), partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai proses organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada pemerintah daerah, anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Untuk menghasilkan stuktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran

kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil dimasyarakat untuk satu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005).

Partisipasi dalam penyusunan merupakan keterlibatan yang meliputi pemberian pendapat, pertimbangan, dan usulan dari bawahan kepada pimpinan dalam mempersiapkan dan merevisi anggaran. Pimpinan yang mampu meningkatkan partisipasi bawahannya, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan cenderung lebih lancar dari pada pimpinan yang tidak mampu meningkatkan partisipasi bawahannya. Dengan meningkatnya partisipasi, maka bawahan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan kegairahan kerja serta rasa tanggung jawab dapat ditingkatkan (Siskawati, 2004).

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama legislatif daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat

petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD,selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Dalam penyusunan anggaran tahunan, mekanisme dan proses penyingkapan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumberdaya yang dibutuhkan,periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke panitia eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke panitia eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak legislatif (Kemendagri No 29 Tahun 2002).

APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan

bagaimana program-program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan (Mardiasmo,2002), yaitu :

- 1.Membantu pemerintah mencapai tujuan Fiskal dan meningkatka koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- 4.Meningkatkan transpransi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Selanjutnya, Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu:

1. Eksekutif
  - a. Kabinet
  - b. Eksekutif
  - c. Departemen-departemen pemerintah
  - d. Departemen keuangan
  - e. Unit kerja pemerintah yang memberikan dana.
2. legeslatif
  - a. DPR ditingkat pusat
  - b. Komisi-komisi di DPR
  - c. DPRD

### 3. Auditor

Dengan Memandang APBD sebagai proses manajemen pemerintah maka proses penyusunan APBD dianggap sebagai proses administrasi pemerintah. Birokrasi pemerintahan juga beroperasi sebagaimana organisasi perusahaan dimana setiap elemen sosial dan kenegaraan dikontrol dan diarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

#### **D. Karakteristik Tujuan Anggaran**

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD' 45. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Norma dan prinsip-prinsip Anggaran berbasis kinerja (Ikhsan,2007) yaitu:

#### 1. Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab (*good governance*).

#### 2. Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus berdasarkan azas efisiensi, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Penetapan besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat.

4. Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

5. Format Anggaran

Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan dalam proses penganggaran adalah suatu cara atau metode yang ditempuh untuk menyiapkan, merumuskan, dan menyusun anggaran. Dalam pendekatan ini akan tergambar arah atau arus dari proses persiapan, perumusan dan penyusunan anggaran, akan tergambar pula mengenai asal atau sumber inisiatif dan kearah mana inisiatif tersebut dilaksanakan.

Menurut Ikhsan (2001), pendekatan dalam proses penganggaran dalam suatu pemerintahan dapat dilakukan melalui :

a. *Top-Down Approach* (otoriter)

Anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Kebaikan pendekatan ini koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja akan lebih mudah dan lebih cepat dilakukan karena disusun oleh pihak-pihak



yang melakukan koordinasi dan pengawasan. Kelemahannya adalah unit kerja yang tertinggi sering kali tidak dapat merumuskan rencana anggaran atau rencana kerja yang benar-benar memenuhi keinginan dan kebutuhan unit kerja yang lebih rendah, sehingga akan sulit untuk dilaksanakan.

b. *Bottom-Up Approach* (demokrasi)

Pada metode ini bawahan diberikan kepercayaan untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa yang akan datang dan kemudian diserahkan kepemimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Kebaikan dari anggaran ini adalah bahwa rencana kerja yang diusulkan oleh unit kerja menggambarkan keinginan dan kebutuhan yang nyata. Kelemahannya adalah sering kali terjadi bahwa unit kerja terkecil/terbawah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyusun rencana kerja sehingga mutu hasil rencana bervariasi dan kadang sulit untuk berkoordinasi sehingga waktu penyusunan menjadi lebih lama.

c. Kombinasi *Top-Down Approach* dan *Bottom-Up Approach*

Metode ini merupakan campuran antara metode otoriter dan metode demokrasi. Anggaran yang disusun dari atas akan dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan berdasarkan pengarahan. Unit kerja di atas cukup mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana dan program sesuai dengan pedoman yang telah digariskan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari pendekatan Top Down ataupun Bottom-Up dengan harapan akan memberikan hasil yang paling baik.

Menurut Bastian (2005) karakteristik sektor publik adalah :

- a. Anggaran di nyatakan dalam satuan keuangan dan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, misalnya satu atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen untuk mencapai sasaran yang di tetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi daripada penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat di rubah dalam waktu kondisi tertentu.

Kajian teoritis sebagai dasar dalam penelitian ini masih banyak menggunakan kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan karena variabel-variabel yang diteliti masih menggunakan dengan variabel penelitian pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai

dasar dalam mendukung penelitian ini. Adapun lima tujuan karakteristik penganggaran/*Budgetary Goal Characteristics* (Kenis 1979) adalah sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka, partisipasi anggaran adalah sebagai proses di mana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Kenis, 1979).

Aimee & Carol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang.

Maryanti (2002) menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dipengaruhi oleh partisipasi anggaran baik dalam menyiapkan usulan anggaran, pelaksanaan anggaran maupun dalam mempertanggung jawabkan anggaran.

## **2. Kejelasan Tujuan Anggaran**

Kejelasan tujuan/sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979).

Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Maryanti (2002) menyatakan bahwa mencantumkan sasaran anggaran secara spesifik adalah lebih produktif dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik dan hanya mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik. Tujuan/Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari pegawai dan Maryanti (2002) menemukan bahwa aparat pemerintah daerah Propinsi NTT dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran dibuatnya dan mereka merasa puas bahwa anggaran yang dibuatnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

## **3. Umpan Balik Anggaran**

Kenis (1979) menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya

untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas. hal ini dapat memperkuat atau mencegah perilaku-perilaku karyawan. Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa orang akan melakukan dengan lebih baik apabila mereka memperoleh umpan balik mengenai kearah tujuan yang ingin dicapai karena umpan balik membantu mengidentifikasi penyimpangan antara apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka inginkan.

Kenis (1979) menemukan hanya kepuasan kerja dan motivasi anggaran ditemukan signifikan dengan hubungan yang agak lemah dengan umpan balik anggaran. Umpan balik mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer.

Maryanti (2002) menemukan bahwa umpan balik mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan sikap. Hal ini menunjukkan aparat pemerintah daerah Propinsi NTT mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa sukses.

#### **4. Evaluasi Anggaran**

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan kinerja manajer.

Menurut Kenis (1979) Evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.

Penemuan Kenis (1979) adalah bahwa manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran.

Maryanti (2002) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah.

### **5.Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 ;382) adalah sebagai kinerja, hasil kerja/prestasi kerja dan Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan, bagaimana

cara mengerjakannya dan mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, prestasi yang dilihat dan kemampuan kinerja.

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan Kinerja dalam mewujudkan saran, tujuan, visi, dan misi, pada pemerintah daerah (Siskawati, 2004). Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam waktu periode tertentu. Kinerja Aparat Pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan.

Menurut Sardjito dan Mutthaer (2007) Kinerja aparat pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment sistem*.

Menurut Argyris (1952) dalam Darlis (2001) menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan, partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi.

Menurut PP No. 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam

memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2002;65). Dalam pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan anggaran perlu adanya perbandingan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran akuntabilitas pemerintah. Namun, yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis dengan menggunakan input yang berasal dari publik. Sehingga, perlu dilakukan akomodasi atas input tersebut agar tidak mengundang kritikan dari publik.

#### **A. Indikator Kinerja**

Menurut Bastian (2005) Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*). Kinerja dapat dinilai dengan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut (bastian,2005):

1. Masukan (*input*)  
Yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
2. Keluran (*output*)  
Yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau program masukan yang digunakan. Hasil (*outcome*), yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
3. Manfaat (*benefit*)  
Yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
4. Dampak (*impact*)  
Yaitu: tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Menurut bastian (2005) Syarat indikator kinerja yang baik yaitu:

1. Spesifik, jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. *Measurable*, mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya.
3. *Attributable*, indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
4. *Relevan*, indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antar indikator.
5. *Timely*, indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan.

## **B. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.



Sistem pengukuran kinerja aparat pemerintah daerah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur *finansial* dan *non finansial* (Mardiasmo, 2002 ;121). Pengukuran ini bertujuan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik, *kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensi, sehingga tidak ada indikator tunggal yang digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komferehensif.

Tujuan pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh mulyadi (2003:422) adalah sebagai berikut : “Tujuan pokok tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan”.

Menurut Mulyadi (2003: 427) manfaat dari pengukuran kinerja yaitu :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

### C. Aspek yang di ukur

Menurut Bastian (2005;276), setiap organisasi tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut :

1. Aspek finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2. Kepuasan pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu jika dikaitkan dengan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Operasi dan Bisnis

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis.

4. Kepuasan pegawai

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh nyata.

5. Kepuasan komunitas dan *Shareholders/stakeholders*

Pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari pada stakeholder

## 6. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan *up to date*.

Organisasi struktur publik menggunakan anggaran untuk menilai keberhasilan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat dan bukan untuk memperoleh laba. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja berikutnya.

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak dalam dinas pemerintahan tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan selanjutnya sangat menentukan bagi kesuksesan anggaran.

### **E. Pandangan Islam Tentang Kinerja**

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang bergerak dan giat beramal serta berusaha.

Pada umumnya semua pekerjaan memerlukan pengembangan amanah yang teruji dalam hal kemampuan menjalankan pekerjaan serta tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيكُمْ آيَاتِنَا  
 وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ  
 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

*Artinya: Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami telah mengutus kepadamu rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.(151)*

Agama islam berseru dan mengajak setiap umat manusia untuk berusaha, bekerja serta beramal dan selalu memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain serta dunia akhirat. Allah menjanjikan orang-orang yang beramal akan dijadikan khalifah dimuka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Q. S. An-nur:55

الَّذِينَ  
 دِينُهُمْ  
 يَعْبدُونِي  
 هُمْ  
 لَمْ  
 يُشْرِكُونَ  
 شَيْئاً  
 الَّذِينَ  
 قَبْلِهِمْ  
 لَيْسَتْ خُلُقُهُمْ  
 لِيُؤْمِنُوا لَهُمْ  
 خَوْفِهِمْ

*Artinya : Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman*

*sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik (55)*

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman dan mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini berarti semakin sungguh-sungguh seorang dalam melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan maka akan mendapatkan hasil yang baik.

## **F. Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, hipotesis diturunkan didasarkan pada teori yang relevan, tetapi belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dari proses pengumpulan data.

### **1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah**

Aimee dan Carol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara kedalam operasional kita bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konsisten dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang.

Sardjito dan Osmed (2007) melakukan tentang penyusunan anggaran kinerja aparat pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, dan menyebutkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran

maka semakin meningkat kinerja aparat pemerintah daerah. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses dimana para atasan dinilai kinerjanya berdasarkan pencapaian target anggaran, keterlibatan dan pengaruhnya pada penyusunan target anggaran tersebut.

Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Rokan Hilir, sehingga hipotesis yang ada dapat diturunkan sebagai berikut :

**H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

## **2. Pengaruh kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah**

Kenis (1979) melakukan penelitian tentang kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kejelasan tujuan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja, efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara positif meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Maryanti (2002) menemukan bahwa aparat pemerintah daerah provinsi NTT dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran dibuatnya dan mereka

merasa puas bahwa anggaran yang dibuatnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Kejelasan tujuan anggaran diharapkan dapat membantu atasan untuk mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam perencanaan dalam perencanaan anggaran, sehingga secara logis kinerja dapat tercapai dan adanya kesadaran akan kejelasan tujuan dapat mengatur perilaku dan kinerja.

Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Rokan Hilir, sehingga hipotesis yang ada dapat diturunkan sebagai berikut:

**H2 : Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

### **3. Pengaruh umpan balik anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah daerah**

Kenis (1979) menemukan hanya kepuasan kerja dan motivasi anggaran ditemukan signifikan dengan hubungan yang agak lemah dengan umpan balik anggaran. Umpan balik mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer. Penemuan ini gagal untuk menjelaskan hasil dari berbagai studi dengan hubungan umpan balik, sikap, kinerja.

Maryanti (2002) menemukan bahwa umpan balik mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan sikap (kinerja). Hal ini menunjukkan aparat pemerintah daerah Provinsi NTT mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa sukses. Konsep yang digunakan dalam melakukan umpan balik atas hasil

kinerja yang menguntungkan maupun tidak yang dicapai baik oleh manajer menengah atau bawah adalah konsep penguatan positif. Jika varian yang menguntungkan, atasan harus memberi pujian, promosi, dan *reward* yang maksimal. Jika terjadi varian yang merugikan, maka manajer tingkat menengah dan bawah tidak boleh dihukum tetapi harus dibimbing untuk memperbaiki hasil kinerja yang telah dicapai.

Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Rokan Hilir, sehingga hipotesis yang ada dapat diturunkan sebagai berikut:

**H3 :Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

#### **4. Pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah**

Penemuan kenis (1979) menyatakan bahwa manajer memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam suatu gaya *punitive* (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran,, kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel lemah.

Maryanti (2002) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, pada saat pelaksanaannya mereka melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi tinggi.



Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Rokan Hilir, sehingga hipotesis yang ada dapat diturunkan sebagai berikut:

**H4 :Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

**5. Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah**

Maryanti (2002) menemukan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik, evaluasi anggaran yang sama-sama berpengaruh terhadap perilaku, sikap, dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, pada saat pelaksanaannya mereka melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi tinggi.

Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja, efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara positif meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran

berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Rokan Hilir, sehingga hipotesis yang ada dapat diturunkan sebagai berikut

**H5 : Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

#### **G. Teori Penelitian Sebelumnya**

Sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan peneliti sebelumnya untuk dijadikan bahan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.1. berikut ini :

Tabel II.1. Daftar Nama Peneliti Terdahulu dan Hasil Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian	Persamaan atau Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Munawar (SNA, 2006)	Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kupang	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Partisipasi Anggaran</li> <li>-Kejelasan Tujuan Anggaran</li> <li>-Umpan Balik Anggaran</li> <li>-Evaluasi Anggaran</li> <li>-kesulitan anggaran</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sikap</li> <li>-Perilaku</li> <li>-Kinerja</li> </ul>	<p>Variabel karakteristik tujuan anggaran yang diwakili dari partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), umpan balik anggaran (X3), evaluasi anggaran (X4), dan kesulitan anggaran (X5) secara bersamaan berpengaruh terhadap perilaku. Hasil pngujian parsial (uji t) yaitu karakteristik tujuan anggaran yang diwakili</p>	<p>Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama</p> <p>Perbedaan : Hanya menggunakan variabel dependen kinerja</p>

				<p>oleh variabel partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), umpan balik anggaran (X3), evaluasi anggaran (X4), dan kesulitan anggaran (X5) terhadap perilaku, secara parsial hanya variabel partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), umpan balik anggaran (X3), kesulitan anggaran (X5), yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku, sedangkan evaluasi anggaran (X4) tidak berpengaruh secara</p>	
--	--	--	--	---	--

				signifikan terhadap perilaku	
2	Ikhsan dan Ane (2007)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi	-Partisipasi Anggaran -Senjangan Anggaran	Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran	Persamaan : Menggunakan variabel partisipasi anggaran  Perbedaan : Tidak menggunakan variabel moderasi
3	Rahayu, dkk (2007)	Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Jambi	Independen: -Partisipasi Anggaran -Kejelasan Tujuan Anggaran -Umpan Balik anggaran -Evaluasi anggaran  Dependen: -Proses penyusunan anggaran	-partisipasi anggaran berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. -Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap penyusunan anggaran -Umpan Balik anggaran tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran -Evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran	Persamaan: menggunakan variabel independen yang sama yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran.  Perbedaan: menggunakan variabel dependen yaitu proses penyusunan anggaran
4.	Veby Anggi Wulandari	Pengaruh Karakteristik Tujuan	Independen: -Partisipasi Anggaran	Variabel karakteristik tujuan	Persamaan : Menggunakan

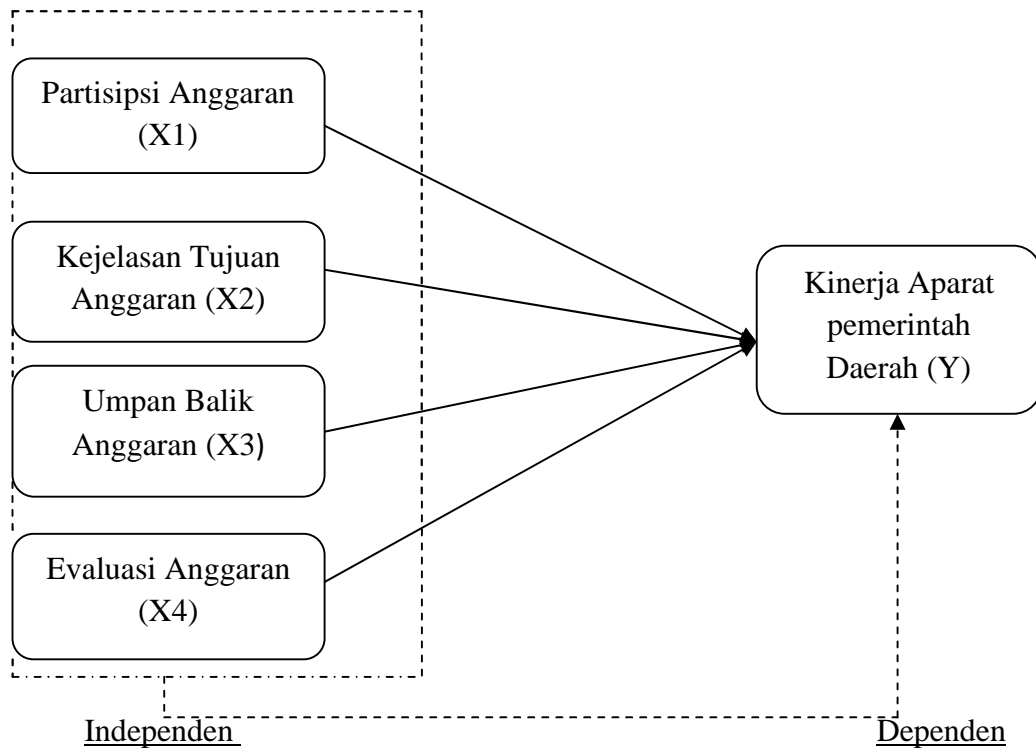
	(2008)	<p>Anggaran Terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Pekanbaru</p>	<p>-Kejelasan Tujuan Anggaran  -Umpan Balik Anggaran  -Evaluasi Anggaran  -Umpan balik anggaran</p> <p>Dependen :  -Kinerja Pemda</p>	<p>anggaran yang diwakili dari partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), umpan balik anggaran (X3), evaluasi anggaran (X4), dan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja. Hasil pengujian parsial (uji t) yaitu karakteristik tujuan anggaran yang diwakili oleh variabel partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), umpan balik anggaran (X3), evaluasi anggaran (X4),</p>	<p>an variabel independen yang sama</p> <p>Perbedaan :  -tempat penelitian</p>
--	--------	--	---	---	--

				terhadap kinerja, secara parsial variabel partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), Evaluasi anggaran (X4), yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku, sedangkan Umpan balik anggaran (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemda	
5	Herminingsih (SNA, 2009)	Pengaruh Partisipasi dalam penganggaran dan peran manjerial pengelolah keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Demak	Independen: -Partisipasi dalam penganggaran -Peran manajerial pengelola keuangan daerah  Dependen: -kinerja aparat Pemda	partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Persamaan :  Menggunakan variabel partisipasi dan dependen kinerja Pemda

## H. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun pada bagian sebelumnya. berikut ini akan digambarkan model hubungan antar variabel sebagai berikut :

gambar II.1 Model Penelitian





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi, Sampel dan Unit Analisis**

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi dapat diartikan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu ( Indriantoro dan Supomo,2002). Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yang berada di kabupaten rokan hilir yaitu dinas-dinas yang terdapat di kabupaten Rokan hilir yang berjumlah sebanyak 12 dinas dan 1 kantor DPRD bagian Anggaran.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ( Sugiono, 2003 : 73). Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yakni pejabat yang berada di bawah kepala dinas, yaitu kepala dinas, kepala bagian yang berada dimasing-masing dinas dan DPRD bagian Anggaran dipemerintahan kabupaten Rokan Hilir, yang masa jabatannya minimal 1 tahun dan pendidikan minimal D3.

Alasan dipilihnya sampel tersebut pada penelitian ini karena mereka menduduki jabatan teknis dan memiliki peranan yang besar terhadap pekerjaan di lapangan, dimana mereka berhubungan dan terjun langsung dalam pekerjaan teknis di lapangan. Dampaknya, mereka memahami permasalahan dan

mengetahui lebih akurat mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam operasional kerja.

Berdasarkan data yang penulis di peroleh ada 12 dinas dan 1 kantor DPRD bagian anggaran yang berada di kabupaten Rokan Hilir yaitu :

**Tabel III.1 Sampel kepala bagian dan Kepala Subbagian**

No	Nama Dinas	Jumlah Sampel	
		Kepala Dinas	Kepala Bagian
1	Dinas Pendapatan Daerah	1	5
2	Dinas kebersihan, Pertamanan, dan Pasar	1	6
3	Dinas Marga dan Perairan	1	4
4	Dinas Kesehatan	1	4
5	Dinas Pendidikan Nasional	1	4
6	Dinas Perhubungan	1	4
7	Dinas Pertanian	1	4
8	Dinas Kehutanan	1	4
9	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1	4
10	Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah	1	4
11	Dinas Perkebunan	1	4
12	Badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat	1	4
13	DPRD bagian Anggaran/Kesra (Kesejahteraan Rakyat)		2
	Jumlah	12	53

Sumber: Dinas pemerintahan kabupaten Rokan Hilir 2011

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Hasil dari penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang secara khusus

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo,2002:147).

Data ini di peroleh langsung dari responden yang berupa opini terhadap suatu kegiatan atau data subjek tertulis yang diperoleh melalui instrumen kuesioner. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi pada suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self report data*). Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden (Indriantoro, 2002:145). Data primer ini dikumpulkan data yang yang harus diolah. Data primer diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan salah satunya secara tertulis atau bentuk kuesioner. Kuesioner berisi tanggapan atas pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti yang secara langsung disebarkan kepada dinas-dinas dan Aparat Pemerintah Daerah.

### **C. Defenisi Variabel Operasional dan Pengukuran**

Menurut Indriantoro (2002), variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasional terhadap konstruk yaitu upaya mengurangi abstraksi sehingga dapat diukur. Defenisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel dependen dan independen dapat diketahui dari hipotesis

yang dikemukakan. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan yang dimaksud dengan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.

Ada 4 variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pemerintah daerah. Berikut penjelasan mengenai definisi operasional variabel masing-masing.

### **1. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah kinerja para individu atau kemampuan pimpinan/individu untuk dapat mencapai prestasi kerja yang dicapai oleh unit kerjanya dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pemda. variabel ini diukur menggunakan beberapa instrumen Herminingsih (2009) Tesis. Membagi instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pemda yaitu, terdiri dari 7 pertanyaan (terlampir halaman 3) Variabel kinerja aparat pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skala LIKERT antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1) dari jawaban responden menunjukkan rendahnya kinerja aparat pemerintah daerah dan skor tinggi (5) menunjukkan tingginya kinerja aparat pemerintah daerah.

### **2. Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang di usulkan oleh unit kerjanya

dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Yogi Andrianto (2008) Tesis, yang terdiri dari 5 butir pertanyaan (terlampir di halaman 4) yang mengukur tingkat partisipasi, pengaruh yang dipersepsikan dan kontribusi responden dalam proses penyusunan anggaran. Untuk melakukan pengukuran terhadap partisipasi anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.

### **3. Kejelasan Tujuan Anggaran**

Kejelasan anggaran mengacu pada tingkat dimana kejelasan anggaran yang ditetapkan secara spesifik dan jelas, dan yang mudah oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya oleh Munawar (2006) dan Ehrman Suhatono (2006) SNA 9 Padang. Untuk melakukan pengukuran kejelasan tujuan anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Penelitian ini, menggunakan kuisisioner terhadap kejelasan tujuan anggaran disajikan sebanyak 3 item pertanyaan (terlampir di halaman 5).

### **4. Umpan Balik Anggaran**

Umpan balik anggaran mengenai tingkat pencapaian tujuan anggaran tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer. Instrumen yang digunakan mengukur variabel partisipasi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2002)

dan Veby Anggi Wulandari (2010). Untuk melakukan pengukuran umpan balik anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dalam penelitian ini, kuisisioner terhadap umpan balik anggaran disajikan sebanyak 4 item pertanyaan ( terlampir di halaman 6).

## **5. Evaluasi Anggaran**

Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Instrumen yang digunakan mengukur variabel partisipasi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Veby Anggi Wulandari (2010). Untuk melakukan pengukuran evaluasi anggaran digunakan kuisisioner yang dinilai dengan dengan skala likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dalam penelitian ini, kuisisioner terhadap evaluasi anggaran disajikan sebanyak 5 item pertanyaan (terlampir di halaman 7).

## **D. Analisis Data**

### **1. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  table

untuk degree of freedom (  $df$  ) =  $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel, jika  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  table dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan membandingkan antara nilai  $t$  hitung >  $t$  tabel, maka berkorelasi positif atau valid.

### **b.Uji Reliabilitas**

Istilah realibilitas disamakan dengan konsisten, stabil atau dapat dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Meskipun demikian reliabilitas alat ukur tidak harus selalu diuji dengan melakukan tes ulang, karena berbagai teknik telah memungkinkan pengujian reliabilitas yang tidak memerlukan lebih dari satu kali pengukuran.

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini (Indrianti dan Supomo, 2002:179).

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan

rumus statistik, dari regresi berganda. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan diuji apakah data yang ada telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya analisis dengan metode ini.

Ada empat asumsi klasik yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Gujarati,2005; dalam Tengku 2009). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi.

#### **A. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi residual normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai K-S Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu :

Hipotesis Nol ( $H_0$ ) : data terdistribusi normal (nilainya jauh diatas  $\alpha=0,05$ )

Hipotesis alternatif ( $H_A$ ) : data tidak terdistribusi secara normal (nilainya jauh dibawah 0,05)

#### **B. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.



Hal ini sering ditemukan pada data *time series* ( runtut waktu). Pada data *cross section* (silang waktu) masalah autokorelasi relatif jarang terjadi ( Ghozali,2002).  
 untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut :

H0 : tidak ada autokorelasi (  $r = 0$  )

HA : ada autokorelasi (  $r \neq 0$  )

Kriteria Autokorelasi Durbin- Watson (Ghozali, 2006) :

Tidak ada autokorelasi =  $0 < d < dl$

Tidak ada autokorelasi =  $dl < d < du$

Tidak ada korelasi negatif =  $4 - dl < d < 4$

Tidak ada korelasi negatif =  $4 - du < d < 4 - dl$

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif =  $du < d < 4 - du$

### C. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut heterokedastisitas, dengan kata lain bila terjadi heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat *scatterplot* dari hasil pengolahan data dari paket statistikdalam komputer yaitu dengan melihat pola *scatterplot*, dan Uji Glejser yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2006).

#### D. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2007) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai Tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  (Ghozali,2006).

#### E. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 17. Model regresi berganda ini akan dapat dicerminkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- $X_1$  : Partisipasi anggaran
- $X_2$  : Kejelasan tujuan anggaran
- $X_3$  : Umpan balik anggaran
- $X_4$  : Evaluasi anggaran
- $Y$  : Kinerja
- $e$  : Residual yang terstandarisasi (error)
- $a$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien regresi.

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Secara Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95% dengan tingkat signifikan sebesar 5 % (  $p \text{ value} < 0,05$  ). Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ table}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sebaliknya jika  $t \text{ hitung} > t \text{ table}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti Pvariabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### **2. Uji Simultan (Uji F)**

Untuk pengujian variabel independen secara bersamaan digunakan statistik Uji F (F test) dilakukan untuk melakukan apakah model pengujian hipotesis yang dilakukan tetap. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis Uji F ini dilakukan dengan membandingkan  $F_{\text{hitung}}$  dengan  $F_{\text{tabel}}$  dengan tingkat kepercayaan yang ditentukan adalah 5%. jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti bahwa variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 3. Koefisien Determinan

Koefisien Determinan ( $R$ ) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Koefisien determinan ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk menguji secara empiris tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan hilir, hasil penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis regresi berganda dan pembahasan.

#### A. Demografi Responden

Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sampel penelitian ini adalah Kepala Dinas dan kepala Bagian, DPRD bagian Anggaran yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang mana terdapat pada 12 kantor dinas dan 1 kantor DPRD bagian Anggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini.

**Tabel IV.1 Sampel kepala bagian dan Kepala Subbagian**

No	Nama Dinas	Jumlah Sampel	
		Kepala Dinas	Kepala Bagian
1	Dinas Pendapatan Daerah	1	5
2	Dinas kebersihan, Pertamanan, dan Pasar	1	6
3	Dinas Marga danPerairan	1	4
4	Dinas Kesehatan	1	4
5	Dinas Pendidikan Nasional	1	4
6	Dinas Perhubungan	1	4
7	Dinas Pertanian	1	4
8	Dinas Kehutanan	1	4
9	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	1	4
10	Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah	1	4

11	Dinas Perkebunan	1	4
12	Badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat	1	4
13	DPRD bagian Anggaran/ Kesra (Kesejahteraan Rakyat)		2
	Jumlah	12	53

Sumber: Dinas pemerintahan kabupaten Rokan Hilir 2011

Sementara kuisisioner yang disebarakan secara keseluruhan adalah sebanyak 65 buah kuisisioner. Tingkat pengumpulan kuisisioner dapat dilihat pada table IV.2 dibawah ini.

**Tabel IV. 2 : Tingkat Pengumpulan Kuisisioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Total kuisisioner yang disebarakan	65	100%
Total kuisisioner yang kembali	56	86 %
Total kuisisioner yang tidak kembali	9	14 %
Total kuisisioner yang dapat dianalisis/diolah	56	86 %

**Sumber : Data Olahan (2011)**

Berdasarkan dari table di IV.2 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 65 kuisisioner, kuisisioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 9 buah atau 14% dikarenakan 1 responden kepala dinas, 2 responden kepala bagian dikantor DPRD dan 6 responden kepala bagian dikantor dinas tidak mengembalikan kuesiner dengan waktu yang telah disepakati atau ditentukan bersama untuk mengambil kuesisioner kembali, disebabkan para responden tersebut sibuk dan lagi dinas keluar kota. Sedangkan Kuisisioner yang terkumpul kembali sebanyak 56 buah atau 86%. Jadi total kuisisioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuisisioner yang disebarakan adalah 56 buah atau 86%. Sedangkan data

demografi responden berdasarkan masa kerja, pendidikan terakhir, umur dan jenis kelamin terlihat pada table IV.3 di bawah ini.

**Tabel IV. 3 : Demografi Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
<b>Masa kerja</b>		
1-5 tahun	19	34%
5-10 tahun	37	66%
Lebih dari 10 tahun	0	0
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
D3	8	19%
S1	38	68%
S2	10	18%
SLTA	0	0
<b>Umur</b>		
21-30 tahun	8	14%
31-40 tahun	30	55%
41-50 tahun	10	17%
Di atas 50 tahun	8	14%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	39	70%
Perempuan	17	30%
<b>Jabatan</b>		
Kapala Dinas	11	20%
Kapala Bagian	45	80%

Sumber : Data Olahan(2011)

Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden sebagai berikut:

1. Berdasarkan masa kerja pegawai responden dengan masa kerja dibawah 5 tahun yaitu sebanyak 19 orang atau 34%, masa kerja antara 5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 37 orang atau 66%.
2. Berdasarkan pendidikan terakhir, kebanyakan responden berpendidikan strata satu (S1) yaitu sebanyak 38 orang dengan persentase 68%, sedangkan D3 sebanyak 8 orang atau 14%, dan 10 responden lainnya atau 18% berpendidikan S2.
3. Berdasarkan umur responden didominasi oleh responden yang berumur diantara 21-30 tahun sebanyak 8 orang atau 14%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 30 orang atau 55%, dan yang berumur 41-50 tahun 10 orang atau 11% dan 50 tahun ke atas sebanyak 8 orang atau 14%
4. Responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 39 orang atau 70%, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang atau 30%.
5. Berdasarkan jabatan responden dibagian kepala dinas ada sebanyak 11 orang atau 20% dan dibagian kabag sebanyak 45 orang atau 80%.

### **B.Statistik Deskriptif Responden**

Analisa data dilakukan terhadap 56 sampel responden yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel IV.4 di bawah ini.



**Tabel IV.4 Statistik Deskriptif Responden**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KINERJA	56	25	34	28.77	2.080
PARTISIPASI	56	16	25	20.16	2.222
TUJUAN	56	9	15	12.64	1.482
UMPAN	56	13	20	16.43	1.777
EVALUASI	56	22	33	27.00	2.790
Valid N (listwise)	56				

**Sumber: Hasil Data Olahan**

Dalam tabel IV.4 terlihat bahwa variabel kinerja aparat pemda mempunyai nilai minimum sebesar 25 nilai maksimum sebesar 34 dan nilai rata-rata sebesar 28,77 dengan standar deviasi 2,080, jika jawaban responden lebih tinggi dari 2,080 maka variabel kinerja manajerial cenderung tinggi.

Variabel partisipasi mempunyai nilai minimum 16 dan nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata sebesar 20,16 dengan standar deviasi 2,222, Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 2,222 maka hubungan variabel penelitian partisipasi penyusunan cenderung tinggi.

Variabel tujuan kejelasan anggaran mempunyai nilai minimum 9 dan nilai maksimum 15, dan nilai rata-rata sebesar 12,64 dengan standar deviasi 1,482. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 1,482 maka kejelasan tujuan anggaran cenderung tinggi.

Variabel umpan balik mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimum 20, dan nilai rata-rata sebesar 16,43 dengan standar deviasi 1,777. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 1,777 maka umpan balik cenderung tinggi.

Variabel evaluasi mempunyai nilai minimum 22 dan nilai maksimum 23, dan nilai rata-rata sebesar 27,00 dengan standar deviasi 2,790. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 2,790 maka evaluasi cenderung tinggi.

### C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini akan menentukan layak data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah *valid* dan *reliable*. Oleh karena itu kuesionernya layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

#### 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja aparat pemerintah daerah

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas kinerja Pemda yang ditunjukkan pada tabel IV.5 berikut:

**Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Kinerja aparat pemerintah daerah**

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	t hitung	t tabel	Kesimpulan	Croanbach Alpha	Keputusan
y1.1	0,392	3,21	1,673	Valid	0,638	Baik
y1.2	0,303	2,52	1,673	Valid		
y1.3	0,434	3,62	1,673	Valid		
y1.4	0,543	4,93	1,673	Valid		
y1.5	0,550	5,00	1,673	Valid		
y1.6	0,618	6,18	1,673	Valid		
y1.7	0,301	2,31	1,673	Valid		

**Sumber : Hasil Data Olahan**

y1.1= dalam pelaksanaan program, saya mengutamakan pencapaian target kinerja tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan

y1.2=ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan dengan program yang telah ditetapkan sangat baik

y1.3=suatu kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan tingkat pencapaian program yang telah ditetapkan.

y1.4=Saya selalu memperhatikan dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat

y1.5=Atasan selalu merealisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan

y1.6=Efisiensi operasional (pencapaian realisasi belanja dengan standar belanjanya)

y1.7=Moral tiap-tiap personel unit kerja (perubahan perilaku pegawai dalam berkinerja)

Dari tabel IV.5 dapat dilihat bahwa variabel kinerja pemda dengan 7 butir pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai t hitung yang terendah 2,31 > nilai t tabel 1,673. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel dependen (kinerja) yang nilai t hitung > t tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid (Ghozali, 2006). Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai *cronbach alpha* adalah 0.638 yang berarti variabel kinerja pemda tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60 (Ghozali,2006).

## 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas partisipasi anggaran

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas partisipasi anggaran yang ditunjukkan pada tabel IV.6 berikut:

**Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas partisipasi anggaran**

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	t hitung	t tabel	Kesimpulan	Croanbach Alpha	Keputusan
X1.1	0,562	5,11	1,673	Valid	0,749	Baik
X1.2	0,650	6,50	1,673	Valid		
X1.3	0,711	7,90	1,673	Valid		
X1.4	0,667	6,67	1,673	Valid		
X1.5	0,582	5,29	1,673	Valid		

### Sumber : Hasil Data Olahan

x1.1 = Saya terlibat dalam penyusunan anggaran di wilayah pertanggungjawaban saya.

x1.2 = saya mempunyai pengaruh dalam penentuan jumlah akhir dari anggaran wilayah pertanggungjawaban saya.

x1.3 = saya selalu memprakarsai dalam diskusi penyusunan anggaran

x1.4 = Pengaruh usulan atau pemikiran anda terhadap anggaran akhir

x1.5 = kontribusi saya di wilayah pertanggungjawaban saya sangat penting.

Dari tabel IV.6 dapat dilihat bahwa variabel partisipasi anggaran dengan 5 pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai t hitung terendah sebesar 5,11 > nilai t tabel sebesar 1,673. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (partisipasi anggaran) yang nilai t hitung > t tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya,

nilai *cronbach alpha* adalah 0,749 yang berarti variabel partisipasi anggaran tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

### 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas kejelasan tujuan anggaran

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas kejelasan tujuan anggaran yang ditunjukkan pada tabel IV.7 berikut:

**Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas kejelasan tujuan anggara**

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	t hitung	t tabel	Kesimpulan	Croanbach Alpha	Keputusan
X2.1	0,851	12,15	1,671	Valid	0,828	Baik
X2.2	0,728	8,08	1,671	Valid		
X2.3	0,831	12,14	1,671	Valid		

#### **Sumber : Hasil Data Olahan**

x2.1=Saya sangat mengetahui dengan jelas dan spesifik sasaran anggaran dibagian saya

x2.2=Saya berpendapat bahwa apabila terjadi ketidakjelasan sasaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

x2.3=Saya memiliki pemahaman yang jelas atas bagian sasaran anggaran yang merupakan prioritas yang lebih penting dibanding dengan lainnya.

Dari tabel IV.7 dapat dilihat bahwa kejelasan tujuan anggaran dengan 3 pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai t hitung yang terendah 8,08 > nilai t tabel sebesar 1,673. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (kejelasan tujuan anggaran) yang nilai t hitung > t tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji

reliabilitasnya, nilai *cronbah alpha* adalah 0,828 yang berarti variabel kejelasan tujuan anggaran tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

#### 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas umpan balik anggaran

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas umpan balik anggaran yang ditunjukkan pada tabel IV.8 berikut:

**Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas umpan balik anggaran**

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	t hitung	t tabel	Kesimpulan	Croanbach Alpha	Keputusan
X3.1	0,720	8,00	1,673	valid	0,732	Baik
X3.2	0,538	5,38	1,673	valid		
X3.3	0,711	7,90	1,673	valid		
X3.4	0,483	4,38	1,673	valid		

#### Sumber : Hasil Data Olahan

x3.1= Umpan balik mengenai pencapaian sasaran anggaran

x3.2= Umpan balik dan pengarahan seberapa baik usaha yang saya lakukan dalam pencapai sasaran anggaran

x3.3= Atasan memberitahukan seberapa baik usaha yang saya lakukan dalam pencapai sasaran anggaran.

x3.4= Untuk mencapai sasaran umpan balik membantu mengidentifikasi penyimpangan antara apa yang dikerjakan dan apa yang ingin dikerjakan.

Dari tabel IV.8 dapat dilihat bahwa umpan balik anggaran dengan 4 pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai yang terendah yaitu nilai t hitung 4,38 > nilai t tabel sebesar 1,673. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (umpan balik anggaran) yang nilai

$t$  hitung  $>$   $t$  tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai *cronbach alpha* adalah 0,732 yang berarti variabel umpan balik anggaran tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

### 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas evaluasi anggaran

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas evaluasi anggaran yang ditunjukkan pada tabel IV.9 berikut:

**Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas evaluasi anggaran**

Variabel	Validitas				Reliabilitas	
	Pearson Corelation	t hitung	t tabel	Kesimpulan	Croanbach Alpha	Keputusan
X4.1	0,406	3,38	1,673	Valid	0,657	Baik
X4.2	0,442	3,68	1,673	Valid		
X4.3	0,641	6,41	1,673	Valid		
Xs4.4	0,561	5,61	1,673	Valid		
X4.5	0,362	3,01	1,673	Valid		
X4.6	0,403	3,35	1,673	Valid		
X4.7	0,266	2,21	1,673	Valid		

**Sumber : Hasil Data Olahan**

x4.1= Atasan memberikan penjelasan tentang anggaran

x4.2= Atasan memberikan penjelasan atas anggaran mengenai efisiensi dalam kedudukan dikantor

x4.3= Atasan menyatakan bahwa penyimpangan anggaran di bagian saya adalah faktor yang perlu diperhitungkan dalam mempertimbangkan kenaikan gaji.

x4.4= Atasan menganggap bahwa saya sendiri yang bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran yang terjadi di bagian saya.

x4.5= Atasan menunjukkan ketidakpuasan atas hasil yang dicapai manakala anggaran tidak dapat dicapai.

x4.6= Atasan memberikan komentar atas kinerja saya yang lemah manakala terjadi penyimpangan anggaran.

X4.7= Atasan akan marah atas penyimpangan yang tidak menguntungkan dari anggaran

Dari tabel IV.9 dapat dilihat bahwa umpan balik anggaran dengan 7 pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai yang terendah yaitu nilai  $t$  hitung  $2,21 >$  nilai  $t$  tabel  $1,673$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (evaluasi anggaran) yang nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai *cronbah alpha* adalah  $0,657$  yang berarti variabel evaluasi tersebut reliabel karena koefisien alpha di atas  $0,60$ .

## **D.Analisis Data Penelitian**

### **D.1. Uji Asumsi Klasik**

#### **1.Analisis Uji Normalitas**

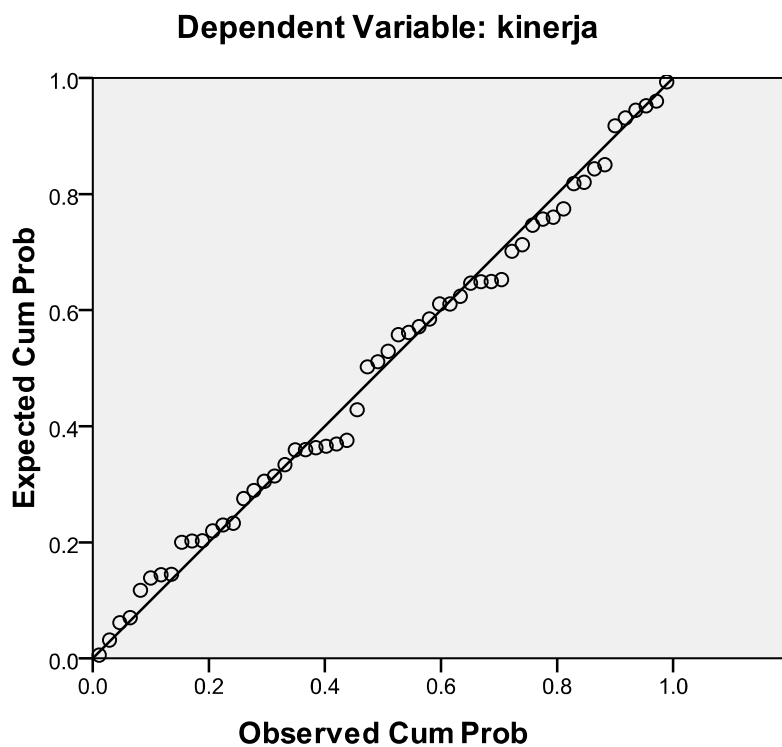
Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis *multivariate* khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan *normal probability plot*, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variable menghasilkan nilai dengan  $P >$   $0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel



*probability plot* yang diteliti terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada gambar IV.1 dibawah ini :

**Gambar IV.1**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Sumber : Hasil Data Olahan**

Dari *normal probability plot* diatas dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menguji nilai residual dengan uji Kolmogorov-Smirnov, Untuk menguji apakah distribusi residual normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnav.

Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel IV.10 dibawah

**Tabel IV.10 Hasil Uji Normalitas ( K-S Test )**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67708536
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.564
Asymp. Sig. (2-tailed)		.909

a. Test distribution is Normal

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Tabel IV. 10 menunjukkan Nilai K-S sebesar 0,564 (sig 0,909) untuk semua variabel tersebut diatas 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kinerja, partisipasi, tujuan, umpan balik, dan evaluasi anggaran secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2007) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah

dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendahnya sama dengan nilai VIF tinggi ( karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah nilai Tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  (Ghozali,2006). Hasil uji multikolonieritas disimpulkan seperti pada tabel IV.11 dibawah :

**Tabel IV. 11 Hasil Uji Multikolonieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PARTISIPASI	.626	1.598
	TUJUAN	.729	1.372
	UMPAN	.824	1.214
	EVALUASI	.899	1.112

a. Dependent Variable: KINERJA

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Namun pada tabel IV.11 terlihat bahwa tiap-tiap variabel independen mempunyai nilai *tolerance* jauh diatas 0,05 ( $>5\%$ ) serta nilai VIF tiap independen adalah  $VIF < 10$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin-watson, terlihat pada tabel IV.12

**Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.593 <sup>a</sup>	.352	.301	1.739	1.647

a. Predictors: (Constant), EVALUASI, UMPAN, TUJUAN, PARTISIPASI

b. Dependent Variable: KINERJA

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Pada tabel IV. 12 terlihat bahwa angka Durbin Watson sebesar 1,647 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 5%, jumlah sampel (n) 65 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka ditabel Durbin Watson test bound akan diperoleh nilai sebagai berikut :

$$d_u = 1,568$$

$$d_l = 1,315$$

$$DW = 1,947$$

$$\text{Jadi. } 4 - 1,647 \text{ (} 4 - d_u \text{)} = 2,432$$

$$d_u < d < 4 - d_u$$

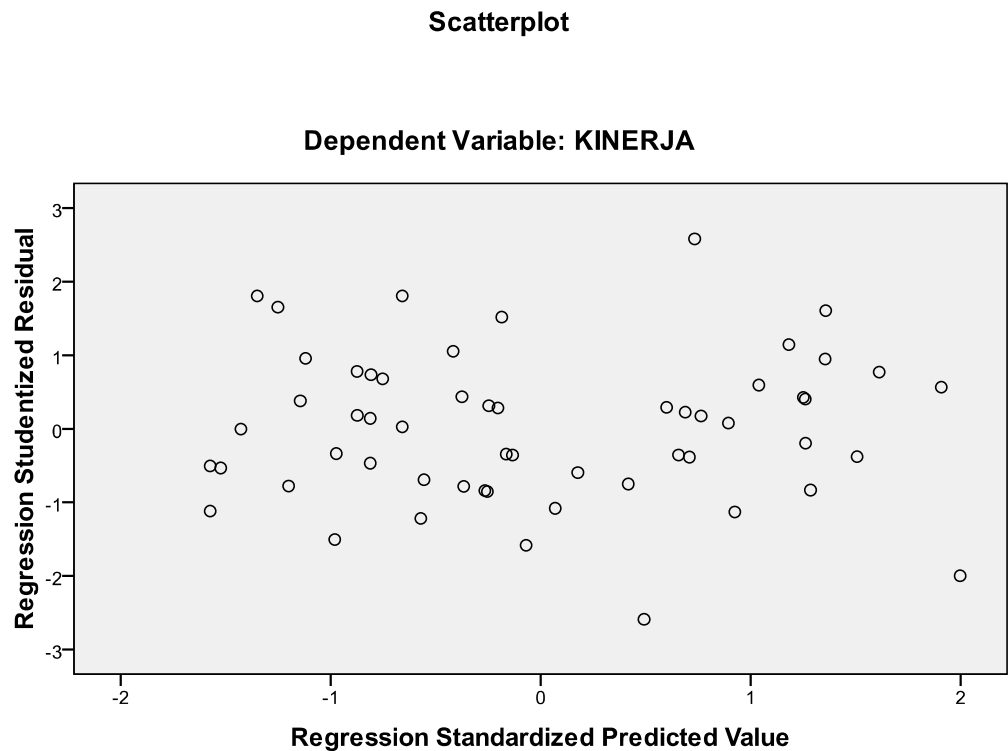
$$1,568 < 1,647 < 2,432$$

Oleh karena nilai DW 1,647 lebih besar dari batas atas ( $d_u$ ) 1,568 dan kurang dari  $4 - 1,568$  ( $4 - d_u$ ) = 2,432, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Santoso, 2001), Seperti terlihat pada gambar IV.2 dibawah :

**Gambar IV.2**  
**Diagram Scatterplot Heterokedastisitas**



**Sumber : Hasil Data Olahan**

Pada Gambar IV.2 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas yang berarti model

regresi layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan memasukkan variabel independen.

Uji Heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Tabel dibawah ini memperlihatkan hasil uji heteroskedastisitas.

**Tabel IV.13 Hasil Uji Glejser**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.234	1.865		.125	.901
	partisipasi	.087	.077	.194	1.135	.262
	tujuan	-.123	.108	-.181	-1.138	.261
	umpan	-.057	.084	-.101	-.680	.500
	evaluasi	.068	.052	.189	1.324	.192

a. Dependent Variable: AbsUt

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Dari hasil uji glejser pada tabel 1V.13 menunjukkan bahwa variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

### E. Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dilakukan dengan menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan kinerja aparat pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen. Hasil pengujian hipotesis seperti yang tercantum pada tabel IV.14 di bawah :

**Tabel IV.14 Hasil Regresi**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	14.023	3.208		4.371	.000
	PARTISIPASI	-.172	.133	-.184	-1.292	.202
	TUJUAN	.547	.185	.390	2.954	.005
	UMPAN	.226	.145	.193	1.554	.126
	EVALUASI	.281	.089	.377	3.170	.003

a. Dependent Variable: KINERJA

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut :

$$Y = a + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + e$$

$$Y = 14,023 - 0,172X_1 + 0,547X_2 + 0,226X_3 + 0,281X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= kinerja aparat daerah
A	=konstanta
$b_1, b_2, b_3, b_4$	= koefisien regresi
x1	= partisipasi anggaran
x2	= kejelasan tujuan anggaran
x3	= umpan balik anggaran
x4	= evaluasi anggaran
e	= eror

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 14,023 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 1402,3
2. Hasil regresi menunjukkan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar -0,172 yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (kinerja aparat pemerintah daerah) juga akan mengalami peningkatan sebesar -17,2%.
3. Hasil regresi menunjukkan variabel kejelasan tujuan anggaran sebesar 0,547 yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan anggaran mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen juga akan mengalami peningkatan sebesar 54,7%.
4. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel umpan balik anggaran sebesar 0,226 yang menyatakan bahwa umpan balik anggaran mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen juga akan mengalami peningkatan sebesar 22,6%



5. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran sebesar 0,281 yang menyatakan bahwa evaluasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen juga akan mengalami peningkatan sebesar 28,1%.

### 1.Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### a. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

**Tabel IV.15 Hasil parsial (Uji t)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.023	3.208		4.371	.000
	PARTISIPASI	-.172	.133	-.184	-1.292	.202
	TUJUAN	.547	.185	.390	2.954	.005
	UMPAN	.226	.145	.193	1.554	.126
	EVALUASI	.281	.089	.377	3.170	.003

a. Dependent Variable: KINERJA

**Sumber : Hasil Data Olahan**

### 1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan statistik t hitung sebesar - 1,292 dengan nilai signifikansi sebesar 0,202 ( diatas 0,05) atau t hitung = - 1,292 lebih kecil dari t tabel = 1,673, maka **Hipotesis 1 ditolak**. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja

aparatus pemerintah daerah. Artinya nilai partisipasi anggaran yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin rendah dan nilai partisipasi anggaran yang semakin rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi.

## **2. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatus pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

Berdasarkan statistik  $t$  hitung sebesar 2,954 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau  $t$  hitung = 2,954 lebih besar dari  $t$  tabel = 1,673 maka **Hipotesis 2 Diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja aparatus pemerintah daerah. Artinya semua tujuan anggaran yang telah dibuat akan berdampak pada kenaikan atau penurunan kinerja. Nilai kejelasan tujuan yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin meningkat dan sebaliknya.

## **3. Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatus pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir**

Berdasarkan statistik  $t$  hitung sebesar 1,554 dengan tingkat signifikan sebesar 0,126 (di atas 0,05) atau  $t$  hitung = 1,554 lebih kecil dari  $t$  tabel = 1,673 maka **Hipotesis 3 Ditolak**. Hasil ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja aparatus pemerintah daerah artinya kenaikan atau penurunan umpan balik tidak akan berdampak signifikan kepada kinerja.

## 2. Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan statistik t hitung sebesar 3,170 dengan signifikan sebesar 0,003 (di bawah 0,05) atau t hitung =3,170 lebih besar dari t tabel =1,673 maka **Hipotesis 4 Diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya kenaikan evaluasi anggaran akan berdampak signifikan kepada kinerja.

### b. Hasil Uji Regresi Secara Simultan ( Uji F )

Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel IV.16 di bawah ini :

**Tabel IV.16 Hasil Uji F Hitung**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.751	4	20.938	6.924	.000 <sup>a</sup>
	Residual	154.231	51	3.024		
	Total	237.982	55			

a. Predictors: (Constant), EVALUASI, UMPAN, TUJUAN, PARTISIPASI

b. Dependent Variable: KINERJA

### Sumber : Hasil Data Olahan

Pada tabel IV.16 hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,924 > dari pada F tabel sebesar 2,553, dengan nilai signifikan probabilitas sebesar 0,000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Model regresi dapat memprediksi kinerja atau dapat dikatakan bahwa partisipasi, tujuan, umpan balik, dan evaluasi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja.

### c. Koefisien Determinasi

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel IV. 17 dibawah ini :

**Tabel IV.17 Hasil Kofesien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 <sup>a</sup>	.352	.301	1.739

a. Predictors: (Constant), EVALUASI, UMPAN, TUJUAN, PARTISIPASI

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Tabel di atas menunjukkan model summary besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,301 , hal ini berarti 30,1% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran. Sedangkan sisanya ( 100% - 30,1% = 69,9% ) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model misalnya gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi. Standar Error of estimate (SEE) sebesar 1,739. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Tabel diatas menunjukkan R sebesar 0,593 berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan variabel independen cukup kuat karena R lebih besar dari 0,5. Nilai  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,352 artinya 35,2% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran. Sedangkan sisanya 64,8%(100% - 35,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model misalnya gaya kepemimpinan,

budaya organisasi, dan komitmen organisasi. Standar Error of estimate (SEE) sebesar 1,739. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2006).

## **F.Pembahasan**

### **1. Hipotesis 1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja Aparat Pemda di kabupaten Rokan Hilir**

Dari hasil uji regresi secara parsial, pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif (-1,292) yang tidak signifikan (0,202) terhadap kinerja Aparat Pemda di kabupaten Rokan Hilir. Artinya nilai partisipasi anggaran yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin rendah dan sebaliknya nilai partisipasi anggaran yang semakin rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan para penyusun anggaran disetiap dinas tidak bertanggung jawab atas anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya, hanya sebagian orang saja yang terlibat didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di setiap divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Partisipasi yang tidak baik akan membawa kerugian, diantaranya memberikan pengaruh yang tidak sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme sehingga memberikan hasil yang tidak baik dari sebuah rencana yang dibuat dan tidak dapat meningkatkan kerja sama antar divisi disetiap masing-masing dinas di Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maryanti (2002) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif (-4,550) yang tidak signifikan (0,009) terhadap kinerja manajerial terhadap perilaku dan sikap aparatur pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan anggaran yang dibuat tidak spesifik dan tidak jelas sehingga membuat kinerja aparat pemerintah daerah menjadi rendah.

**2. Hipotesis 2 : kejelasan tujuan anggaran secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir.**

Pada pengujian hipotesis kedua, menunjukkan bahwa bahwa kejelasan tujuan anggaran secara parsial berpengaruh positif (2,954) secara signifikan (0,005) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir. Artinya semua tujuan anggaran yang telah dibuat akan berdampak pada kenaikan atau penurunan kinerja. Nilai kejelasan tujuan yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin meningkat, karena atasan disetiap dinas tersebut menunjukkan kepada bawahan tentang luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik, jelas, dan mudah dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kenis (1979) bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran diharapkan dapat membantu atasan untuk mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam perencanaan

anggaran, sehingga secara logis kinerja dapat tercapai dan adanya kesadaran akan kejelasan tujuan dapat mengatur perilaku dan kinerja.

**3. Hipotesis 3 : umpan balik anggaran secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir**

Pada pengujian hipotesis ketiga, menunjukkan umpan balik anggaran secara parsial berpengaruh positif (1,554) yang tidak signifikan (0,126) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Artinya kenaikan atau penurunan umpan balik tidak akan berdampak signifikan kepada kinerja, dikarenakan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas anggaran yang telah dibuat oleh masing-masing dinas untuk kepentingan masyarakat umum. Seorang atasan juga tidak mengalami ketidakpuasan dari hasil kerja yang disusunnya, karena atasan dimasing-masing dinas tersebut hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap dan kinerja atasan pada setiap instansinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Veby Anggi Wulandari (2010) bahwa interaksi atau umpan balik anggaran berpengaruh positif (0,540) yang tidak signifikan (0,593) yang nyata antara karakteristik tujuan anggaran dengan motivasi kinerja terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Gresik. Hal ini menunjukkan dalam melakukan umpan balik atas hasil kinerja yang tidak menguntungkan oleh atasan menengah atau bawah, maka atasan tingkat menengah dan bawah tidak boleh dihukum tetapi harus dibimbing untuk memperbaiki hasil kinerja yang telah dicapai.

**4. Hipotesis 4 : Evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.**

Pada pengujian hipotesis keempat, menunjukkan bahwa evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh positif (3,170) yang signifikan (0,003) terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Artinya kenaikan atau penurunan evaluasi anggaran akan berdampak kepada kinerja, karena aparat pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hilir melakukan peninjauan kembali atas anggaran yang telah dibuat sebelumnya disetiap masing-masing dinas. Hal ini disebabkan tidak akan pernah terjadi kesalahan yang terdapat dilapangan karena dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Veby Anggi Wulandari (2010) menemukan bahwa evaluasi anggaran pengaruh positif (0,702) yang signifikan (0,000) yang nyata antara karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan dalam menyiapkan anggaran selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, pada saat pelaksanaannya mereka melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi tinggi.



**5. Hipotesis 5 : Partisipasi anggaran, Kejelasan tujuan anggaran, Umpan balik anggaran dan Evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.**

Pada pengujian hipotesis kelima , menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran, Kejelasan tujuan anggaran, Umpan balik anggaran dan Evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh positif (6,924) yang signifikan (0,000) terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,924 > dari pada F tabel sebesar 2,553, dengan nilai signifikan probabilitas sebesar 0,000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan model ini layak untuk digunakan (signifikan).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Maryanti (2002), Munawar (2006), Rahayu (2007), Ikhsan dan Ane (2007), Veby Anggi Wulandari (2010).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hipotesis pertama hasil regresi secara parsial menerangkan bahwa Partisipasi anggaran secara statistik di peroleh nilai t hitung sebesar -1,292 yang tidak signifikan sebesar  $0,202 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif (-1,292) yang tidak signifikan (0,202) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Mengacu pada hasil penelitian maka **H1 tidak bisa diterima atau ditolak.**
2. Berdasarkan hipotesis kedua hasil regresi secara parsial menerangkan bahwa Kejelasan tujuan anggaran statistik di peroleh nilai t hitung sebesar 2,954 dengan signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran secara parsial berpengaruh positif (2,954) yang signifikan (0,005) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Mengacu pada hasil penelitian maka **H2 diterima.**

3. Berdasarkan hipotesis ketiga hasil regresi secara parsial menerangkan bahwa umpan balik anggaran statistik di peroleh nilai t hitung sebesar 1,554 dengan signifikan sebesar  $0,126 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran secara parsial berpengaruh positif (1,554) yang tidak signifikan (0,126) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Mengacu pada hasil penelitian maka **H3 tidak bisa diterima atau ditolak.**
4. Berdasarkan hipotesis keempat hasil regresi secara parsial menerangkan bahwa evaluasi anggaran statistik di peroleh nilai t hitung sebesar 3,170 dengan nilai signifikan sebesar  $0,003 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran secara parsial bahwa evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh positif (3,170) yang signifikan (0,003) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Mengacu pada hasil penelitian maka **H4 diterima.**
5. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,924 dengan signifikan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,005$ . Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.
6. Koefisien Determinasi (Adjusted  $R^2$ ) sebesar 0,301 yang berarti variabilitas dari variabel dependen (kinerja pemerintah daerah) dapat dijelaskan oleh variabilitas dari independen (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran) sebesar 30,1%. Sedangkan sisanya sebesar 69,9% dijelaskan

oleh variabel lainnya seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi yang tidak diteliti atau tidak masuk dalam model regresi.

7. Nilai  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,352 artinya 35,2% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran. Sedangkan sisanya (  $100\% - 35,2\% = 64,8\%$  ) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model misalnya gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi.

#### **B.Keterbatasan Penelitian**

1. Jumlah sampel yang menjadi objek penelitian dari jumlah 12 dinas dan 1 kantor DPRD bagian anggaran yaitu 12 orang kepala dinas dan 53 orang kepala bagian, ternyata yang kembali hanya 56 responden. Artinya penelitian ini belum dapat memenuhi syarat populasi yang ada seluruhnya (100%).
2. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ) diperoleh nilai 0,301. Hal ini berarti 30,1% kinerja dipengaruhi oleh empat variabel yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran. Berdasarkan nilai ini masih ada sebab-sebab yang lain diluar model yang dapat mempengaruhi kinerja sebesar 69,9% misalnya gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi.

### **C.Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian hanya variabel kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah sementara dua variabel yaitu partisipasi anggaran, dan umpan balik anggaran, tidak mempengaruhi kinerja untuk itu disarankan pada pemerintah daerah di Kabupaten Rokan hilir agar memperhatikan kedua variabel tersebut agar dapat meningkatkan kinerja.
2. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menguji variabel-variabel lain untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa meningkatkan kinerja aparat di pemerintah daerah seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi.
3. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an (Surah Al-Anbiya' ayat 107)

Al-Qur'an (Surah An-Nisa ayat 29)

Afrizal, 2011. *Pengaruh Rentabilitas terhadap Pembayaran Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.

Arrita, Rini, 2004. *Pengaruh Likuiditas, Penjamin Kewajiban, Rentabilitas, Leverage Keuangan terhadap Nilai Dividen Per Share pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.

Atmaja, Lukas Setia, 2002. *Manajemen Keuangan*, Edisi 2, Yogyakarta.

Darsono dan Ashari, 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Andi, Yogyakarta.

Djamil, Nasrullah. *Akuntansi yang Islami Sebagai Model Alternatif Dalam Pelaporan Keuangan*. [http:// www. Archive.html](http://www.Archive.html). Diakses pada tanggal 12 maret 2011.

Faisal, Melanie, Andina, 2003. *Pengaruh Arus Kas terhadap Jumlah Pembagian Dividen Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNAND, Padang.

Ghozali .2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Jakarta

Gitman, Lawrencej. (2003) *Principles Of Managerial Finance*. 10<sup>th</sup>edition. Addison Wesley. [http// www. Ukrida.ac.id](http:// www. Ukrida.ac.id). Diakses pada tanggal 12 Mei 2003.

Hanafi, Mamduh M dan abdul Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. UUP AMP YKPN, Yogyakarta.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hardinata, 2006. *Pengaruh Arus Kas, Likuiditas dan Rentabilitas perusahaan terhadap Pembayaran Dividen pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.

Hartono, 2005. *Analisis Retensi Kepemilikan pada Penerbitan Saham Pedana sebagai Sinyal Nilai Perusahaan*. Skripsi Universitas Yogyakarta.

- Hasan, Iqbal, 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hery, 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur, Supomo, Bambang, 2002. *Metode Penelitian Bisnis Edisi Pertama*, BPFE Yogyakarta.
- Institute For Economic And Finance Research. 2005. *Indonesia Capital Market Directory 2005*. Jakarta.
- Irianti, Tjiptowati Endang, 2008. *Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas dan Laba terhadap Harga dan Return Saham*. Skripsi Universitas di Ponegoro, Semarang.
- Kamiliya, 2009. *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Profesi Pertumbuhan Perusahaan dan Arus Kas terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.
- Kurniawati, 2005. *Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas dan Stabilitas Laba terhadap Dividen Per Share (Dps) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.
- Kieso dan Weygandt, 2002. *Akuntansi Intermediate*, Edisi ketujuh, Binarupa Aksara, Jakarta Barat Indonesia.
- Kieso E. Donald, dkk, 2002. *Akuntansi Intermediate*, Edisi sepuluh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk Analisis Data dan Uji Staitistik*. Media Kom: Yogyakarta.
- Rahmi, Siti Fauzia, 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di BEJ*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.
- Sagala, Dewi Natalia, 2006. *Pengaruh Earnings dan Arus Kas Operasi terhadap Pembayaran Dividen Tunai pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Sawir, Munawir, 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty Yogyakarta.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto, 2002. *Metode Statistik untuk Ekonomi dan Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Supranto, J. 2004. *Statistik Pasar Modal, Keuangan dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanti, Fitri, T. 2006. *Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Dividen Yield bagi Investor di BEJ*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Stice at al. 2004. *Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, PT. Raja Graf Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Lukman, 2009, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi Dalam: Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan*. Edisi Baru, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tandellin, Eduardus. 2010. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. PBF: Yogyakarta.
- Wild, J. John, 2005. *Financial Statement Analysis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya, Muhammad, 2010. *Pengaruh Return On Investment, Cash Ratio, Debt to Total Asset, EPS dan Size terhadap Dividen Kas pada Perusahaan Property dan Realstate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNRI, Pekanbaru.
- Zulianti, Erna. 2010. *Pengaruh Kas Position, Debt to Total Asset dan Return on Asset terhadap Cash Dividen pada Perusahaan LQ-45 yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.